

**IMPLEMENTATION OF BUILDING SUPPORT PROGRAM FOR SELF-HELP HOUSING /
BEDA HOME FOR PEOPLE IN BUO VILLAGE, SOUTH LOLODA SUB-DISTRICT,
HALMAHERA BARAT DISTRICT, NORTH MALUKU PROVINCE**

**ROKI TALIAWO
PATAR RUMAPEA
SALMIN DENGO**

Implementation of self-help stimulant assistance for Buo village community, Loloda sub district, West Halmahera district, North Maluku province. This research uses qualitative method (Observation, In-depth Interview (Indepeth Interview), Documentation). Informant of this research as many as 10 people, 2 employees of Housing and residential area, 1 contractor BSPS, 3 village government, 4 Community receiving BSPS. The collecting technique used is interview (interview), sedangkan data analysis is done with qualitative analysis technique method Based on the results of this study was drawn Conclusion: Implementation of policy is the activity seen after issued a legitimate directives of a policy that includes efforts to manage inputs to produce output or outcome for the community. And the aid of self-help housing stimulant of Self-Housing Stimulant Support hereinafter abbreviated as BSPS is government facilitation in the form of stimulant aid for development / improvement of house quality to Low Income Society. With the Regulation of the Minister of Public Works and People's Housing of the Republic of Indonesia Number 39 / PRT / M / 2015 On Amendment To The Regulation of Minister of Public Housing No. 06 Year 2013 About the Implementation Guidance for Self-Helping Housing Stimulants, the community is given the right to obtain adequate housing left.

Keywords: Implemtation, Service and housing

PENDAHULUAN

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Desa Buo adalah salah satu desa yang tergolong dalam lingkaran masyarakat berpenghasilan rendah diatas rata-rata sehingga wajar saja kalau masyarakat mendapatkan BSPS dari pemerintah karena dengan jumlah penduduk : 1.123 Jiwa dari 365 KK, masyarakat miskin mencapai 235 dan yang mendapkan BSPS hanya

63 KK jika dikalkulasi masyarakat miskin yang mendapatkan BSPS tidak mencapai stengga dari masyarakat miskin yang ada yang artinya bantuan tersebut tidak berhasil, jika dipersenkan hanya mencapai 30-45 % yang mendapatkannya, selain itu, ada juga problem-problem administrasi yang memperlambat realisasinya BSPS seperti; pelayanan pemerintah desa dalam pengurusan administrasi yang lambat, kurangnya daya tanggap pegawai pemerintah, aksesibilitas yang minim, sarana prasarana yang digunakan masih bersifat manual, anggaran BSPS sering terjadi keterlambatan realisasinya, sehingga masyarakat penerima BSPS masih menggunakan financial swadaya/uang pribadi untuk memperlancar pembangunan BSPS yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Program

Secara umum pengertian program adalah himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software.

Pengertian Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Konsep Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga sebagai status lambing social (Azwar, 1996; Mukono, 2000). Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 4 Tahun 1992).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya

atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam simbol-simbol atau bilangan.

Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti kemukakan : Program Pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Masyarakat, maka penelitian ini difokuskan pada

1. Daya tanggap dari pegawai pemerintah desa masih lambat ?
2. Biaya tambahan diluar biaya normal ?
3. Efektifitas dan efisiensi pelayanan ?
4. Penyalahgunaan wewenang ?

Informan Penelitian

1. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman) (2 orang)
2. Kontraktor BSPS(1 Orang)
3. Yang mewakili pemerintah Desa Buo (4 orang)
4. Warga Masyarakat yang mendapatkan Perumahan (4 orang)

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Buo Kec. Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi
2. Wawancara mendalam (Indepeth Interview)
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Metode ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi

Sejarah Desa Buo, Pada Tahun 1949, seorang tetua (Boboyano Yaba) merintis desa buo, dikarenakan pada Tahun sebelumnya (1948) ada masyarakat desa bakun *Masahur Taluke* di makan buaya, bakun adalah desa induk dari desa

buo. Dengan kejadian yang terjadi, masyarakat setempat berinisiatif meninggalkan desa bakun untuk membuat desa baru yang jauh dari sungai tempat berkembang biaknya buaya yang menjadi ancaman nyawa masyarakat Bakun. Semenjak tahun itulah desa Buo punya suatu kesatuan hukum dan punya pemerintahan desa yang mandiri yang terlepas dari desa pertama yaitu Bakun. Pada tahun 1949 desa Buo memiliki Pemerintahan tersendiri, dan masyarakatpun menginginkan harus ada orang yang kemudian mengepalasi sistem pemerintahan di desa tersebut agar sistem tersebut dapat terkontrol, dan berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat berinisiatif untuk memilih secara demokrasi. Salah satu masyarakat yang dipercayakan mampu bertanggung jawab memimpin masyarakat setempat. Dan orang pertama yang dipercayakan masyarakat untuk menjadi kepala desa yaitu *Boboyano Yaba*.

Hasil Wawancara

BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni untuk kelangsungan hidup sehari-hari, dan BSPS bukanlah sarana yang diberikan pemerintah kepada MBR dengan cuma-cuma, agar bisa hidup sejahtera dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga, tetapi BSPS ini juga sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

1. Daya tanggap dari pegawai pemerintah desa masih lambat

Pelayanan pemerintah Desa sudah cukup baik yang dilakukan kepada masyarakat, tetapi ada yang perlu dibenahi karena belum maksimal seperti yang dikatakan Bpk. K.L : pelayanan yang dilakukan oleh pegawai

pemerintah desa sudah cukup baik, tetapi masih ada yang perlu dibenahi dalam pembuatan surat keterangan masih sering terjadi kesalahan dalam pengetikan penulisan redaksi kata isi surat, sehingga bahasa yang digunakan juga kurang efektif dikarenakan masih adanya pegawai pemerintah yang minimnya pengetahuan dan lemahnya daya tanggap dari pemerintah desa yang mengakibatkan sering terjadinya keabsuran pada penulisan isi surat.

2. Biaya tambahan diluar biaya normal

Bantuan stimulan perumahan swadaya/beda rumah adalah program pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan tidak dipungut biaya sepeserpun, BSPS diberikan kepada MBR dengan nominal bervariasi mulai dari Rp. 15.000.000-30.000.000 khusus untuk desa yang memiliki DAK dan Rp. 10.000.000-15.000.000 untuk masyarakat sekuler dan bantuan tersebut untuk peningkatan kualitas dan bangun dari awal, dengan syarat MBR yang ingin mendapatkan BSPS tergolong dalam kriteria-kriteria yang ada, seperti; belum memiliki rumah pribadi, memiliki lokasi untuk membangun rumah dll. Tetapi untuk mendapatkan BSPS ini MBR harus menyiapkan berkas-berkas yang diminta oleh petugas sebagai kelengkapan administrasi, berkas-berkas harus melalui pemerintah Desa setempat.

3. Efektifitas dan efisiensi pelayanan

Efektifitas adalah melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Dua kata yang saling melengkapi baik dalam penyelesaian suatu pekerjaan atau tidak, karena pekerjaan yang dikatakan efektif belum tentu efisien begitu juga sebaliknya. Yang efektif bisa saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar sedangkan yang efisien barangkali memakan waktu yang lama.

4. Penyalahgunaan wewenang

Bukan hanya pejabat tinggi Negara yang dihebohkan bahwa kekuasaan yang tinggi bisa merubah sikap dan tindakan yang dilakukan pada masyarakat dengan menggunakan senjata kekuasaan. Tetapi pejabat desapun sering melakukan seperti yang dikatakan oleh Bpk. V.P ; . Kami merasa lebih baik bahkan berbeda dratis dari sebelumnya. Tetapi sering kali kami tidak bisa menerima sikap yang ditunjukkan pemerintah desa kepada kami masyarakat mengenai pelayanan yang sering memojokan kita baik itu bersifat candaan atau serius tetapi kami merasa tersisikan, selain memojokan kita sering melakukan praktek politik kotor kecil-kecilan (hehe) dengan mengatasnamakan kekuasaan yang mereka duduki. Hal politik kotor yang dilakukan bukan baru sekali, tetapi berulang-ulang yang menurut saya ini tindakat penyalagunaan wewemamg dari pemerintah desa, misalnya, dengan seenak mereka mendahulukan melakukan pekerjaan pribadi dari pada melayani masyarakat yang harus membuat masyarakat menunggu berjam-jam, melibatkan masyarakat dalam pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan sendiri.

Pembahasan

Dalam bagian ini akan dianalisis semua data yang telah di peroleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan pada bagian sebelumnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan seperti yang di kembangkan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu :

1. Pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyutingan seperlunya

2. Reduksi yakni mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak di perlukan.

3. Menyediakan data yakni menyediakan data serta menyederhanakan data yang telah di peroleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akaibat termasuk bertukar pikiran dengan kepala Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman, Kontraktor, teman-teman sejawat serta masyarakat. Kemudian mengambil kesimpulan. Dengan demikian peneliti telah melakukan penelitian selama kurang lebih tiga minggu untuk melakukan pengamatan secara langsung dilapangan, baik itu kinerja pemerintah Kabupaten maupun Desa serta pengumpulan data, reduksi, menyidiakan data dan sampai saat ini pada penarikan kesimpulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Daya tanggap dari pegawai pemerintah desa masih lambat
Sudah cukup baik pelayan yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena mereka melakukan sesuai job mereka. Tetapi mengenai SDM dari pegawai pemerintah perlu lagi lebih ditingkatkan, agar mereka bisa melakukan sesuai apa yang menjadi permimtaan masyarakat.
2. Biaya tambahan diluar biaya normal
Perlu adanya control dari seorang pemimpin Desa (Kades) agar tidak terjadi lagi pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Efektifitas dan efisiensi pelayanan
Efektifitas adalah melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Secara keseluruhan sebagian besar masyarakat mengatakan

bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan baik.

4. Penyalahgunaan wewenang
Penyalahgunaan wewenang dimaksud adalah perlu adanya pembuatan Peraturan Desa (perdes) Buo, tentang hak dan tugas fungsi dari pegawai pemerintah Buo, yang harus melaksanakan sebagai mana mestinya. Bantuan stimulant perumahan swadaya yang diberikan pemerintah kepada masyarakat belum mempengaruhi angka kemiskinan masyarakat yang ada, karena angka kesmikiran masyarakat dengan nominal 235 KK dan yang mendapatkan perumahan tersebut hanya 63 KK, yang menunjukkan bahwa bantuan tersebut belum mencapai setengah realisasinya, jika dipersenkan hanya mencapai 30%.

Saran

1. Perlu dilakukan perubahan pada struktur fungsi job pegawai Desa Buo yang ada, agar pegawai yang memiliki SDM dan daya tangap yang tinggi bisa terisi sesuai besik yang ada.
2. Perlu adanya transparansi pemerintah Desa, agar pada saat masyarakat melakukan pengurusan di Desa tidak ada, praktek-praktek pungutan liar lagi yang dilakukan oleh seagian kecil pegai pemerintah Desa Buo.
3. Di pertahankan atau lebih ditingkatkan lagi kinerja para pegawai pemerintah Desa, agar masyarakat masyarakat menerima pelayanan juga puas dan tidak ragu-ragu melakukan pengurusan kepada pemerintah.
4. Hilangkan segala praktek penyalagunaan kekuasaan yang sering dilakukan pegawai pemerintah Desa, agar job yang ada tidak menjadi bahan omongan masyarakat. Pemerintah Kabupaten dan Desa lebih meningkatkan kualitas kerja dalam pelayanan public, untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi N M, Gedeona T. Hendrikus, Mulyadi D., 2016, *Administrasi publik untuk pelayanan publik*. Alfabeta Bandung
- Dunn N. W., 2013 *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University Prees
- Fahmi I., 2016 *perilaku organisasi*. Alfabeta Bandung
- Haryatmoko., 2015 *Etika publik*. Pt Kanisius
- I B W, Sukidin, Basrowi. 2001. *Perencanaan dan Strategi Pembangunan*. Jember University Press. Jember.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardikanto T, Nugraha G.P. Prima, Asdini S. Krisnha, Thresia Aprillia. 2014 *Pembangunan berbasis masyarakat*, Alfabeta
- Mulyadi D. *Study Kebijakan Publik dan pelayanan Publik*. Alfabeta 2015.
- Parsons W., 2014. *Public Policy*, Kencana Prenadamedia Group
- Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT Rineka Cipta.
- Saragih, Bungaran. 2006. *Pembangunan Agroindustri sebagai Strategi Industrialisasi Jakarta*
- Sinyo .H. S., 2002. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*. Pustaka Sinar Harapan, jakarta.
- Siagian P. S., *Administrasi pembangunan*, Bumi aksara.
- Sidney S. Mara Dkk., 2015., *Handbook Analisis kebijakan Publik*, Nusa Media
- Sinambela P L., 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Akasara.
- Sjafrizal., 2014., *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, PT RajaGrafindo Persada.
- Suharto E., 2010 *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta. Cv
- Surbasono A. 2015 *Analisis kebijakan publik*, Pustaka Pelajar.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*.
Lp Feui. Jakarta.
Tarigan R., 2012,. *Perencanaan Pembangunan
Wilaya*., Bumi Aksara.

Sumber Hukum :

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
*Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN 2004)*,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025.
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permen
PERA) Nomor 6 tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) .